

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada banyak kecenderungan ketertarikan mahasiswa ketika menempuh studinya di universitas, kecenderungan ini sangat plural dan sering sekali sulit diakomodir dalam kurikulum yang telah dirumuskan sebagai mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswanya. Apalagi dalam kajian social dimana pemahaman tentang masyarakat tidaklah akan pernah tuntas atau dalam kata lain kita tidak akan pernah menemukan kata selesai dalam memahami masyarakat. Hal ini bukan hanya karena masyarakat yang menjadi objeknya adalah objek yang dinamis dimana kita harus terus memahaminya secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi/temporal dan spasial sebuah masyarakat, lebih dari itu seorang subjek yang memahai pun adalah subjek yang dinamis (terus berinovasi, berkreasi, berevaluasi, berefleksi, berdialektika) dalam merespon dunia yang dihayatinya.

Karenanya seorang mahasiswa diharapkan memiliki kepekaan social dan harus memilih sejumlah pilihan dari sekian banyak pilihan yang ada dalam menghayati lingkungannya. Berangkat dari hal tersebut maka saya berniat menuliskan skripsi yang berjudul “ **globalisasi dan konflik intrastate di indonesia: studi tentang korelasi globalisasi terhadap merebaknya konflik intrastate di Indonesia**”. Judul tersebut dipilih dan diangkat Oleh penulis

berdasarkan beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan dalam pemilihan judul tersebut antara lain :

- 1) Setelah berakhirnya perang dingin yang berkecamuk dimuka bumi ini dan di akhiri dengan ditandai kemenangan blok barat, masyarakat tidak mendapati isyu sentral lagi hingga pada akhirnya berhembus sebuah isyu kepada masyarakat dunia yang bernama globalisasi dan isyu tersebut menjadi wacana yang cukup mendapat perhatian bahkan dikalangan Hubungan Internasional.
- 2) Pada akhirnya Globalisasi merupakan sebuah fenomena nyata yang terjadi dan hal tersebut dirasakan oleh segenap masyarakat internasional, dimana globalisasi itu sendiri merupakan sebuah bentuk baru dari sebuah tatanan dunia secara menyeluruh yang akan mempengaruhi segenap aspek dari system kehidupan manusia. Secara otomatis, Globalisasi akan memberi pengaruh dan membentuk seluruh masyarakat dunia menjadi sebuah bentuk "*single mainstream system*" dibawah satu system yang dominant. Dan tentunya, membaik dan memburuknya persoalan global dipandang sebagai dampak dari, atau bermuara pada, globalisasi.
- 3) Indonesia, merupakan salah satu Negara dimana masyarakatnya juga menjadi bagian dari masyarakat internasional yang tengah menjalani proses globalisasi dan merupakan salah satu negara di dunia yang dilanda persoalan konflik intrastate cukup serius di negaranya. Ribuan nyawa melayang dan tidak terhitung korban material yang musnah akibat konflik intrastate yang terjadi di Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Globalisasi menempati titik sentral dalam berbagai agenda intelektual dan politik yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan krusial tentang apa yang oleh banyak orang dipandang fundamental dan dinamis ini, yakni sebuah epos perubahan yang menentukan dan secara radikal sedang mentransformasikan hubungan-hubungan dan lembaga-lembaga ekonomi dan social pada abad ke-21¹.

Globalisasi menuntut perubahan pengaturan kebijakan perdagangan dan Investasi yang memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar kapital, teknologi dan tenaga kerja dapat berpindah dengan mudah antar kedaulatan wilayah negara. Sebagai contoh dari kekuatan global yang bergerak cepat, kita dapat melihat bagaimana corak transaksi financial global. Pada tahun 1971, 90 % transaksi financial global terkait dengan ekonomi riil dalam rupa investasi jangka panjang dan hanya berupa 10% berupa spekulasi. Diawal tahun 2000, 95 persen dari 1,5 triliun dollar AS transaksi financial global perhari berupa spekulasi, 80% diantaranya spekulasi dengan kecepatan toleransi 1-7 hari, 40% darinya bergerak dengan kecepatan kurang dari dua hari, tanpa terkait ekonomi riil. Disamping itu, Globalisasi juga menuntut perubahan paradigma, perilaku dan sistem pengalokasian sumber daya ekonomi dan perusahaan.

Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi dihadapi bangsa Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

1. *Produksi*, di mana perusahaan berproduksi di berbagai Negara (MNC), dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah.

¹ James petras dan Henry Veltmeyer "Imperialisme Abad 21" Bab 1 Globalisasi atau imperialisme. Dalam rumusaan masalah. hal 7.

Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.

2. *Pembiayaan.* Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari mancanegara
3. *Tenaga kerja.* Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan \ atau buruh diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
4. *Jaringan informasi.* Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald,

dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia baik yang berdomisili di kota maupun di desa. Menuju pada selera global.

5. *Perdagangan*. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi menjadi semakin cepat karena "less papers/documents" dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.

Dengan kegiatan bisnis korporasi (bisnis corporate) di atas dapat dikatakan bahwa globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antarnegara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antarnegara (cross-border transactions) dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional (international capital flows), pergerakan tenaga kerja (human movement) dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa globalisasi secara hampir pasti telah merupakan salah satu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap bangsa, masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja dan kegiatan bisnis corporate di Indonesia. Kekuatan ekonomi global menyebabkan bisnis korporasi perlu melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha serta melandaskan strategi manajemennya dengan basis entrepreneurship, cost efficiency dan competitive advantages.

Disamping Negara, Institusi Multilateral juga ikut ambil bagian menciptakan konflik interstate. Semula institusi semacam Bank Dunia dan International Monetary fund (IMF) sebagai actor Globalisasi diciptakan untuk memberikan bantuan keuangan dan mengontrol program pembangunan. Namun kenyataannya, Bank Dunia adalah sebuah Bank, yang selalu berminat untuk memperpanjang hutang dengan jaminan modal. Karena itulah cukup diragukan apabila peran mereka dalam proses pembangunan didasarkan atas perhatian dan keprihatinan mereka terhadap manusia dan alam. Artinya apa yang baik bagi Bank itu, belum tentu baik bagi pembangunan Negara penerima hutang dan sebaliknya.

Masih ingat di benak kita bagaimana efek domino jatuhnya nilai mata uang "bath" Thailand pada tahun 1997 kemudian membuat negara kita seringkali mendevaluasi "rupiah". Sistem pemerintahan Orde Baru pun jatuh setelah itu dengan efek rantai kekacauan di segala lini pada aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu kemudian, IMF menyusup masuk ke Indonesia dengan topeng sebagai "dokter" yang membawa resep penyelesaian krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Sebelum pemilu tahun 1999 dengan dibangun infrastruktur dan mekanisme sistemnya, paket *Structural and adjustment* (SAP) IMF telah mempersiapkan tata cata, aturan main, kebijakan, dan sistem liberalisasi ekonomi di Indonesia. 51 butir *Letter of intent* (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF adalah bentuk intervensi agen kapitalis internasional itu untuk menguasai perekonomian bangsa Indonesia. Kebijakan privatisasi, penjualan aset-aset negara yang vital, liberalisasi dan deregulasi ekonomi adalah manifestasi usaha IMF dan kaum kapitalis internasional untuk "merampok" aset-aset ekonomi Indonesia. Inilah

Imperialisme Kapitalisme Internasional yang hendak menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri bangsa lain².

Dalam Hitungan beberapa bulan setelah itu, banyak perusahaan-perusahaan yang merupakan kebanggaan kita menjadi porak poranda. Daftar Kepailitan semakin bertambah. Perusahaan PMA yang semula banyak berinvestasi di Indonesia juga dalam sekejap mengurangi produksi dan menghentikan kegiatan ekspansi perluasan kapasitas pabriknya.

Pada babak berikutnya kita saksikan bagaimana daya beli segmen konsumen masyarakat bawah Indonesia di daerah perkotaan dan pedesaan mengalami kejatuhannya pada titik paling rendah — yang dianggap layak untuk dapat terselenggaranya kehidupan sehari-hari yang berkualitas. Tingkat dan jumlah pengangguran, baik yang formal dan terselubung, bertambah berlipat-lipat kali ganda pada tahun 2005 dibandingkan pada posisi tahun 2000. dan Pada akhirnya menyebabkan ketahanan masyarakat menjadi rentan, mudah marah dan merusak, emosional dan mudah terprovokasi. Sifat mudah merusak ini sangat berbahaya bagi eksistensi prasarana yang ada.

Namun sebelum tata cara dan sistem demokrasi itu dibangun, IMF telah menyusup masuk ke Indonesia dengan topeng sebagai “dokter” yang membawa resep penyelesaian krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Sebelum pemilu tahun 1999 dibangun infrastruktur dan mekanisme sistemnya, paket *Structural and*

² Lihat Bung Karno, dalam DBR, 1964, Jakarta. Hal 122. Di dalam tulisannya tersebut Bung Karno banyak berbicara tentang kapitalisme dan imperialisme, baik secara teoritik maupun praksisnya. Di dalam tulisannya tersebut, Bung Karno menggunakan teori ekonomi Hilferding untuk menganalisa kapitalisme dan imperialisme Belanda di Indonesia pada jaman Hindia Belanda dulu. Imperialisme menurut Bung Karno adalah suatu nafsu, suatu politik, suatu *stelsel* menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri bangsa lain.

adjustment (SAP) IMF telah mempersiapkan tata cata, aturan main, kebijakan, dan sistem liberalisasi ekonomi di Indonesia. 51 butir *Letter of intern* (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF adalah bentuk intervensi agen kapitalis internasional itu untuk menguasai perekonomian bangsa Indonesia. Kebijakan privatisasi, penjualan aset-aset negara yang vital, liberalisasi dan deregulasi ekonomi adalah manifestasi usaha IMF dan kaum kapitalis internasional untuk “merampok” aset-aset ekonomi Indonesia. Inilah Imperialisme Kapitalisme Internasional yang hendak menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri bangsa lain³. Ia adalah wujudnya politik ekonomi kapitalis internasional di era globalisasi abad 21 ini.

Di Indonesia, pengaruh globalisasi dan masuknya modal asing diawali dengan lahirnya Undang-Undang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, tidak lama setelah keruntuhan rezim Orde Lama yang sangat kontroversial. Regulasi ini menandakan berubahnya arah kebijakan ekonomi dan politik luar negeri pemerintah Orde Baru yang lebih mengarah ke ekonomi pasar;. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang anggota tim ekonomi pemerintahan Orde Baru, M. Sadli ;Mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul barat; (Gatra :Agustus 2005). Seolah telah direncanakan, dalam waktu singkat investor asing mulai menanamkan modalnya di Indonesia, perusahaan-

³ Lihat Bung Karno, dalam *DBR*, 1964, Jakarta. Hal 122. Di dalam tulisannya tersebut Bung Karno banyak berbicara tentang kapitalisme dan imperialisme, baik secara teoritik maupun praktisnya. Di dalam tulisannya tersebut, Bung Karno menggunakan teori ekonomi Hilferding untuk menganalisa kapitalisme dan imperialisme Belanda di Indonesia pada jaman Hindia Belanda dulu. Imperialisme menurut Bung Karno adalah suatu nafsu, suatu politik, suatu *stelsel* menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri bangsa lain. Sekarang dalam perkembangan kapitalisme di Indonesia, watak kapitalisme dan imperialisme itu berbeda atau boleh dikatakan jauh lebih kompleks

perusahaan yang dinasionalisasi di era-Soekarno dikembalikan lagi ke pemiliknya. Bermodalkan kekayaan alam yang melimpah ruah, sektor pertambangan menjadi komoditi yang paling menggiurkan bagi perusahaan-perusahaan transnasional. Freeport-Rio Tinto diberikan konsesi pengusahaan kekayaan alam di Papua, Exxon di Aceh, Newmont di Minahasa dan sebagainya. Pemerintah ORBA juga mulai menjalin hubungan dengan IMF dan Bank Dunia untuk mendapatkan pinjaman luar negeri guna menutupi defisit APBN. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Orde Baru memang menghasilkan perbaikan ekonomi di awal kekuasannya. Namun, dalam waktu yang bersamaan pemerintah juga mulai menjual kedaulatan negara ke perusahaan-perusahaan transnasional, IMF dan Bank Dunia, seiring dengan semakin berkurangnya peran negara dalam penguasaan ekonomi dan pengelolaan kekayaan alam. Bagi masyarakat, kehadiran kuasa modal mendatangkan malapetaka yang mengerikan. Kehadiran perusahaan-perusahaan transnasional yang mengantongi izin untuk mengeruk kekayaan alam biasanya diiringi dengan aktivitas-aktivitas perusakan lingkungan yang juga berbanding lurus dengan pelanggaran hak asasi masyarakat setempat. Kehadiran Freeport di Papua misalnya. Sejak tahun 1967 Freeport telah melakukan aktivitas pertambangan yang diiringi dengan perusakan lingkungan dan kejahatan HAM terhadap masyarakat adat setempat. Freeport telah membuat Gunung Yet Segel Ongop Segel (Grasberg) jadi lubang raksasa sedalam 700 m, padahal gunung ini dikiaskan sebagai kepala ibu bagi Suku Amungme, masyarakat adat setempat, yang sangat menghormati wilayah keramat itu. Danau Wanagon, sebagai danau suci orang Amungme juga hancur karena dijadikan tumpukan batuan limbah

(overburden) yang sangat asam dan beracun. Freeport juga mencemari tiga badan sungai utama di wilayah Mimika, yaitu Sungai Aghawagon, Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa sebagai tempat pembuangan tailing (limbah pasir dan hasil produksi). Lebih dari 200.000 ton tailing dibuang setiap harinya ke Sungai Aghawagon, yang kemudian akan mengalir memasuki Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa. Partikel tailing yang tidak mengendap kemudian ikut mengalir sampai ke Laut Arafura (JATAM : 2003). Perusakan lingkungan di wilayah masyarakat adat yang dilakukan oleh Freeport telah melanggar kovenan internasional tentang perlindungan masyarakat adat yakni Konvensi ILO 169 (Convention ILO No.169 Concerning Indigeneous and Tribal Peoples in Independent Countries). Selain itu, dalam dokumen AMDAL PT Freeport Indonesia, sebenarnya pemerintah sudah mengetahui risiko lingkungan atas aktivitas pertambangan yang dilakukannya. Namun, pemerintah seolah tutup mata atas kenyataan ini. Selain melakukan pelanggaran terhadap hak atas identitas budaya dan hak ulayat (yang dilindungi oleh pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria), Freeport juga melakukan kejahatan HAM dengan melakukan pembunuhan pada masyarakat adat yang menolak aktivitas pertambangan yang dilakukan. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1977 adalah peristiwa pertama saat Freeport (kuasa modal) menggunakan TNI (kuasa militer) melakukan pembunuhan atas pemberontakan Suku Amungme dan enam suku lainnya di sekitar wilayah konsesi Freeport. Lebih dari 900 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Keterlibatan TNI dalam pelanggaran HAM dalam kasus ini pertama kali diungkapkan oleh Uskup Muninghof tahun 1995. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

segera membentuk tim untuk meneliti kebenaran laporan itu. Akan tetapi, negara tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk memberi sanksi pada pelaku pelanggaran HAM termasuk Freeport yang menyediakan sarannya. Masuknya Freeport dan MNC lainnya ke Indonesia adalah dampak dari globalisasi perusahaan. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara selatan (negara berkembang dan miskin) lainnya yang entah mengapa sebagian besar memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah untuk industri dan populasi penduduk yang besar sebagai pasar yang potensial.

Pada pengkajian awal masalah penulis menduga adanya suatu benang merah antara berbagai kerusuhan, banyaknya pengganggu, kemiskinan dan konflik interstate yang terjadi di Papua dengan eksistensi PT Freeport Indonesia serta. dan hal-hal tersebut merupakan mata rantai yang saling berkaitan.

C. Pokok Permasalahan

Penelitian ini menempatkan Keberadaan PT Freeport Indonesia sebagai actor globalisasi dalam konflik Papua yang merupakan Konflik Intrastate di Indonesia sebagai obyek studi, dengan pokok permasalahan : Bagaimana PT Freeport Indonesia turut berperan dalam menyebabkan konflik di Papua?

D. Kerangka pemikiran

Untuk Menganalisa dan menjawab Permasalahan diatas penulis menggunakan teori deprivasi ekonomi T.R Gurr yang menyatakan bahwa Konflik kekerasan kolektif meledak karena adanya discrepancy (kesenjangan) ekonomi

yang dialami oleh kelompok tertentu. Kesenjangan itu menjadikan kondisi actual dan apa yang diharapkan oleh kelompok yang bersangkutan semakin menganga, kesenjangan itu lama kelamaan bila dibiarkan terus berlarut akan menimbulkan *structural strain*, yaitu timbulnya bermacam kesulitan dalam lingkungan social sebagaimana ditimbulkan oleh kelompok tersebut..Apa yang dialami oleh kelompok itu disebut *relative deprivation*, yaitu perasaan termarginalkan atau terpinggirkan oleh struktur social yang ada. Apabila sebagian besar kelompok itu telah diliputi oleh perasaan ini, maka secara perlahan-lahan timbul *Social unrest* (ketegangan social). Ketegangan itu akan semakin meningkat bila kelompok yang termarginalkan itu tergolong sebagai kelompok yang besar dimasyarakat. Secara umum masyarakat menjadi resah, dan diam-diam dalam kondisi *propensity* (siaga) untuk mengantisipasi timbulnya hirukpikuk social yang tak diinginkan. Menurut gurr, kondisi semacam ini belum mencukupi sebagai modal bagi meledaknya kerusuhan, tetapi merupakan prasyarat yang mesti ada. Situasi “matang” itu baru meledak menjadi kerusuhan manakala ada factor-faktor pemicu (*triggering factors*) . dengan kata lain social unrest yang sudah mendidih sekalipun tidak akan berkembang menjadi huruhara, jika factor pencetus tidak ada. Sebaliknya ada factor pemicu tetapi kondisi yang belum terbentuk, kecil kemungkinan kerusuhan dapat terjadi.

Rakyat papua telah terpinggirkan secara ekonomi semenjak integrasinya dengan Indonesia. Kekayaan alam yang berlimpah tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh masyarakatnya sendiri. Ketika pertama kali bergabung dengan Indonesia, kekayaan alam Papua langsung ditarik ke Jakarta untuk membenahi

keadaan ekonomi yang morat-marit dengan tingkat inflasi mencapai 250 persen. Ketika ekonomi Indonesia mulai membaik, pemerintahan suharto tidak pula merubah kebijakan tersebut. Kekayaan alam Papua diserap ke pemerintahan pusat tanpa mengembalikan ke Papua dalam jumlah yang seharusnya.

Pada masa pemerintahan suharto, ada beberapa kebijakan pemerintah yang bisa dianggap sebagai kebijakan yang paling membawa kekecewaan secara ekonomi kepada masyarakat. Pertama, kebijakan transmigrasi. Kebijakan ini secara kasat mata akan dipandang sebagai kebijakan yang memajukan Papua karena setelah kebijakan ini diterapkan, lokasi transmigrasi tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi. Pemerintah pun mulai membangun infrastruktur jalan yang mempermudah lalu lintas yang melalui kondisi alam yang sulit dan membangun sarana-saranag public, seperti tempat ibadah, puskesmas dan fasilitas pendidikan, namun pembangunan tersebut hanya terjadi di wilayah transmigrasi dan hanya dirasakan oleh para pendatang di Papua. Penduduk local tetap pada kondisi yang melarat dan buta huruf. Keadaan ini membuat penduduk local merasa terasing diwilayah mereka sendiri. Bagi mereka keadaan ini membuat kekecewaan secara ekonomis semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan pemerintah yang memperburuk kondisi ekonomi rakyat Papua adalah kebijakan hak Pengelolaan hutan (HPH). Efek yang ditimbulkan oleh kebijakan HPH terhadap penduduk local tidak banyak berbeda dengan kebijakan transmigrasi penduduk kembali merasakan keterasingan dengan lingkungan mereka, membuat kekecewaan itu semakin bertambah mendalam pada masyarakat Papua. Freeport menambang kekayaan alam mereka tanpa mengikutsertakan masyarakat

Papua pada umumnya. Freeport juga membuat masyarakat Papua semakin miskin, karena perusahaan ini lebih banyak memperkerjakan pendatang sehingga pendatang di Papua umumnya menjadi lebih makmur secara ekonomi dibanding penduduk asli. Pada umumnya, protes terhadap PT. Freeport dilakukan oleh suku Amungme, yang merasa bahwa PT. Freeport tidak hanya membuat kemiskinan pada mereka, dan juga adalah bahwa daerah operasi PT. Freeport telah melanggar wialyah spiritual suku Amungme dan justru menggunakan kekerasan dan mekanisme hukum khusus untuk membuat suku Amungme hanya bisa melihat kerusakan wilayahnya tanpa mampu berbuat apapun.

Kerugian ekonomi lain yang sangat membekas dalam diri suku Amungme terkait dengan masalah kesehatan karena rusaknya lingkungan dan ekosistem alami mereka. *The United States Overseas Private Investment Corporation* melaporkan bahwa operasi PT. Freeport terus menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitar lokasi penambangan dan menyebabkan persoalan kesehatan yang parah bagi penduduk local.

Pertama, mereka berpartisipasi secara langsung maupaun tidak langsung dalam aksi-aksi OPM seperti perlawanan Fisik, penyebaran pamplet, penyebaran dan pencarian informasi, serta menghadiri rapat-rapat OPM. *Kedua*, memberikan atau menyediakan pakaian, tempat tinggal, obat-obatan dan dana bagi OPM. *Ketiga*, melakukan sosialisasi sekaligus internalisasi pandangan, nilai serta pendapat kepada generasi muda melalui cerita-cerita akan kekejaman Pemerintah Indonesia Yang telah merenggut nyawa dan kepemilikan harta benda dari putra daerah selama bertahun-tahun. Keempat berperan sebagai Informan didalam negeri yang akan siap

E. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik hipotesa bahwa Secara ekonomi, Kehadiran PT. Freeport Indonesia (MNC) sebagai Aktor Globalisasi di papua menyebabkan kemiskinan Rakyat papua, Membuat rakyat Papua termarginalkan Secara Sosio ekonomi. yang pada akhirnya turut menyebabkan konflik Intrastate akibat kesenjangan ekonomi. Hal ini disebabkan PT. Freeport Indonesia menimbulkan Kekecewaan – kekecewaan bagi Rakyat Papua, diantaranya :

1. Hasil keuntungan dari pertambangan yang dikelola oleh PT Freeport dari Alam Papua, Hanya sedikit sekali yang bisa dikembalikan bagi Papua. Dan tidak begitu terasa manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat Papua, tidak sebanding dengan keuntungan Yang diperoleh PT Freeport dan dampak ekologiannya.
2. PT. Freeport Tidak banyak memberdayakan Peran masyarakat Papua Khususnya dalam Penyerapan tenaga kerja, sedangkan pekerja dari luar daerah lebih besar secara jumlah, didukung dengan fasilitas dari Perusahaan dan Penghasilan. Membuat rakyat Papua termarginalkan Secara Sosio ekonomi dan Merasa terasing Ditanah Sendiri.

F. Metode Penulisan

Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan berbagai literatur atau buku, teks, artikel, makalah, serta data-data dari internet yang kaitanya dengan materi yang akan dibahas, serta data-data lain yang relevan, valid, dan reliable sehingga mendukung penulisan skripsi ini.

G. Tujuan Penulisan

Menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia (MNC) yang notabene merupakan actor Globalisasi terhadap konflik di Papua yang merupakan konflik intrastate ditanah air.

Penulisan ini juga dimaksudkan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah di jurusan Ilmu Hubungan internasional Universitas.

H. Jangkauan Penulisan

Untuk menghindari meluasnya materi pembahasan dan mengingat kompleksnya ruang lingkup Globalisasi , maka penulis akan membatasi pada dampak yang ditimbulkannya pada paska Reformasi meskipun tidak menutup kemungkinan untuk melewati atau mundur dari kurun waktu tersebut apabila data dan informasi diluar kurun waktu tersebut dapat dijadikan pertimbangan dan berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

I. Sistematika Penyusunan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam tiap bab akan menguraikan antara lain.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penulisan, tujuan penulisan, jangkauan penulisan, serta sistematika penyusunan skripsi.

**BAB II DEFINISI DAN SEJARAH DAN POTENSI KONFLIK
DALAM GLOBALISASI**

Pada Bab ini akan dipaparkan tentang definisi, sejarah dan actor-aktor Globalisasi (menjelaskan siapa, kapan, bagaimana, mengapa dan dimana globalisasi terjadi). serta kaitannya tentang Neo-Liberalisme.

**BAB III KONFLIK INTRASTATE DI INDONESIA : Separatisme
Papua Vis a Vis PT Freeport Indonesia.**

BAB IV MASA DEPAN PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN